

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				75.828.449.000	
PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				1.175.719.000	
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		14	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	255.368.000	
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		14	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	255.368.000	
		Komponen Input :					
Provinsi	201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	45.816.000	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran
Provinsi	202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	42.216.000	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses
kab/kota	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	6	Laporan	94.080.000	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
kab/kota	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	6	Laporan	73.256.000	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
	5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	153.142.000	
RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	153.142.000	
		Komponen Input :					
Provinsi	201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	153.142.000	34 provinsi +18 satker K/K baru
	5245.BKC	Pemantauan Lembaga		35	Laporan	767.209.000	
	5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		35	Laporan	767.209.000	
		Komponen Input :					
Provinsi	201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	31.552.000	1 laporan@34 provinsi
Provinsi	202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan	103.368.000	laporan semester
Provinsi	203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	19.280.000	
Provinsi	204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan	34.716.000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
Provinsi	205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	32.395.000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)
kab/kota	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	6	Laporan	170.400.000	1 laporan@514 KK
kab/kota	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	6	Laporan	133.200.000	laporan semester
kab/kota	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	6	Laporan	34.488.000	
kab/kota	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	6	Laporan	31.860.000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
kab/kota	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	6	Laporan	175.950.000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@514 KK
	6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				30.895.013.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1.585	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	30.877.363.000	
	6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		413	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	28.685.577.000	
		Komponen Input :					

Provinsi		201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	242.512.000	
Provinsi		202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	134.224.000	
Provinsi		203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan	575.607.000	
Provinsi		204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	528.046.000	
Provinsi		205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	1.464.477.000	
Provinsi		206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	283.519.000	
Provinsi		207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan	1.680.864.000	Laporan triwulan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi
Provinsi		208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)		4	Laporan	490.960.000	Laporan triwulan kegiatan Ketua Provinsi
Kabupaten/Kota		301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	6	Laporan	93.087.000	
Kabupaten/Kota		302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	12	Laporan	408.660.000	
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	24	Laporan	2.819.244.000	
Kabupaten/Kota		304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	12	Laporan	2.410.968.000	
Kabupaten/Kota		305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	24	Laporan	5.768.721.000	
Kabupaten/Kota		306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	24	Laporan	58.500.000	
Kabupaten/Kota		307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	24	Laporan	3.962.520.000	Laporan triwulan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kab/Kota
Kabupaten/Kota		308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		24	Laporan	1.419.912.000	Laporan triwulan kegiatan Ketua Kab/Kota
Kecamatan		401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	119	Laporan	1.202.956.000	
Kecamatan		402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	119	Laporan	5.140.800.000	Laporan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kecamatan
	6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			1.172	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2.191.786.000	
		Komponen Input :						
Kecamatan		401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	1.172	Daerah	2.191.786.000	
	6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan			15	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	17.650.000	
	6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu			15	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	17.650.000	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		3	Unit	2.890.000	
Kabupaten/Kota		301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		12	Unit	14.760.000	
	6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU					0	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	
	6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu			0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	
		Komponen Input :						
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	0	Laporan	0	
	6638	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC					29.872.886.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6638.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			2.713	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	29.872.886.000	

	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc			1.291	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	19.052.100.000	
		Komponen Input :						
Kecamatan		401	Honorarium (Kecamatan)		119	Daerah	11.316.900.000	Ketua = 1 org x 6 bln Anggota = 2 org x 6 bln Kasek = 1 org x 6 bln Pelaksana PNS = 2 org x 6 bln Pelaksana Non PNS = 3 org x 6 bln Tenaga pendukung = 2 org x 6 bln
Kelurahan/Desa		501	Honorarium (Kelurahan/Desa)		1.172	Orang	7.735.200.000	8 bulan
	6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc			1.422	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	10.820.786.000	
		Komponen Input :						
Kabupaten/Kota		301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		6	Lembaga	4.894.220.000	(Ketua + Anggota + Kasek) x 12 bulan
Kabupaten/Kota		302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		6	Lembaga	588.000.000	Sewa Kantor/Ruang Sidang/Gakkumdu = 12 bulan
Kecamatan		402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		119	Daerah	3.180.000.000	6 bulan
Kecamatan		403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		0	Daerah	0	6 bulan
Kecamatan		404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		119	Daerah	2.012.766.000	6 bulan
Kelurahan/Desa		502	Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)		1.172	Orang	175.800.000	
	6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH					8.047.565.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1.312	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	7.857.590.000	
	6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih			1.312	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	7.857.590.000	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	64.480.000	
Provinsi		202	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan	288.004.000	
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	247.782.000	
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	6	Laporan	130.500.000	
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	6	Laporan	3.475.344.000	
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	6	Laporan	1.445.400.000	
Kecamatan		401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	119	Laporan	799.680.000	
Kelurahan/Desa		501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1.172	Laporan	1.406.400.000	
	6839.QCE	Penanganan Perkara			7	Perkara, Berkas Perkara	189.975.000	
	6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih			7	Perkara, Berkas Perkara	189.975.000	
		Komponen Input :						
Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	83.049.000	
Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	6	Perkara	106.926.000	
	6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU					0	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	
	6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu			0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	
Provinsi		202	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	0	Laporan	0	
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	0	Laporan	0	
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	

Kabupaten/Kota		302	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	0	Laporan	0	
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	0	Laporan	0	
	6840.QCE		Penanganan Perkara		0	Perkara, Berkas Perkara	0	
	6840.QCE.001		Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu		0	Perkara, Berkas Perkara	0	
			<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	
Provinsi		202	Penyenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	
Provinsi		203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0	
Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	
Kabupaten/Kota		302	Penyenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	
Kabupaten/Kota		303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0	
	6841		PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN				3.336.688.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6841.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		14	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.790.298.000	
	6841.QIC.001		Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		14	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.790.298.000	
			<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	50.532.000	
Provinsi		202	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan	202.074.000	
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	6	Laporan	150.720.000	
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	6	Laporan	1.386.972.000	
	6841.QCE		Penanganan Perkara		7	Perkara, Berkas Perkara	1.546.390.000	
	6841.QCE.001		Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		7	Perkara, Berkas Perkara	1.546.390.000	
			<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi		201	Penyenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	172.693.000	
Kabupaten/Kota		301	Penyenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	6	Perkara	1.373.697.000	
	6842		PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				2.500.578.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6842.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		140	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.857.972.000	
	6842.QIC.001		Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		140	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.857.972.000	
			<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	138.060.000	
Provinsi		202	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1	Laporan	241.120.000	
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	78.872.000	
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	6	Laporan	569.880.000	
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	6	Laporan	302.880.000	
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	6	Laporan	141.600.000	

Kecamatan		401	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	119	Laporan	385.560.000	
	6842.QCE		Penanganan Perkara		21	Perkara, Berkas Perkara	642.606.000	
	6842.QCE.001		Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		21	Perkara, Berkas Perkara	642.606.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	187.204.000	
Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	41.250.000	
Provinsi		203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	41.360.000	
Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	6	Berkas Perkara	107.325.000	
Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	6	Perkara	41.400.000	
Kabupaten/Kota		303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	6	Perkara	224.067.000	
	115.WA		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				19.761.410.000	
	6849		PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				18.381.139.000	
	6849.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		21	Layanan, Laporan, Dokumen	16.957.233.000	
	6849.EBA.956		Layanan BMN		7	Layanan, Laporan, Dokumen	84.061.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	45.361.000	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota
Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	6	Laporan	38.700.000	Semesteran
	6849.EBA.994		Layanan Perkantoran		14	Layanan, Laporan, Dokumen	16.873.172.000	
			Komponen Input :					
Provinsi/Kab/kota		001	Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	7	Layanan	7.229.906.000	
Provinsi/Kab/kota		002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	7	Layanan	9.643.266.000	
	6849.EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal		106	Unit, M2, Paket	724.000.000	
	6849.EBB.951		Layanan Sarana Internal		106	Unit, M2, Paket	724.000.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit	0	
Provinsi		203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	46	Unit	274.000.000	
Kab/kota		302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit	0	
Kab/kota		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	60	Unit	450.000.000	
	6849.EBB.971		Layanan Prasarana Internal		0	Unit, M2, Paket	0	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	0	
Kab/kota		301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	0	
	6849.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		28	Dokumen, Layanan, Laporan	699.906.000	
	6849.EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran		7	Dokumen, Layanan, Laporan	84.985.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	15.100.000	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran
Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	6	Dokumen	69.885.000	
	6849.EBD.953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi		7	Dokumen, Layanan, Laporan	255.060.000	
			Komponen Input :					

Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	122.082.000	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota
Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	6	Dokumen	132.978.000	
	6849.EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan		7	Dokumen, Layanan, Laporan	222.800.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	15.050.000	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran
Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	6	Dokumen	207.750.000	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan
	6849.EBD.974		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		7	Dokumen, Layanan, Laporan	137.061.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	67.206.000	
Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	6	Dokumen	69.855.000	
	6850		PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM				708.775.000	
	6850.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		30	Layanan, Laporan, Dokumen	587.073.000	
	6850.EBA.957		Layanan Hukum		15	Layanan, Laporan, Dokumen	271.321.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	33.447.000	1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota
Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	14.460.000	
Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	17.584.000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	6	Laporan	114.465.000	
Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	6	Laporan	91.365.000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
	6850.EBA.962		Layanan Umum		7	Layanan, Laporan, Dokumen	99.030.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan	15.660.000	Kegiatan Ketua Provinsi
Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		6	Laporan	83.370.000	Kegiatan Ketua Kab/Kota
	6850.EBA.969		Layanan Bantuan Hukum		8	Layanan, Laporan, Dokumen	216.722.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	48.106.000	
Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	40.216.000	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	6	Laporan	128.400.000	Hanya paket jasa konsultan (advokat)
	6850.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		121	Orang, Layanan	121.702.000	
	6850.EBC.954		Layanan Manajemen SDM		121	Orang, Layanan	121.702.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	43	Orang	35.788.000	Seluruh pegawai provinsi
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	78	Orang	85.914.000	Seluruh pegawai kabupaten/kota
	4355		PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				103.745.000	
	4355.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		7	Dokumen, Layanan, Laporan	103.745.000	
	4355.EBD.961		Layanan Reformasi Kinerja		7	Dokumen, Layanan, Laporan	103.745.000	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen	9.640.000	

Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	6	Dokumen	94.105.000	
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI					567.751.000	
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			14	Layanan, Laporan, Dokumen	567.751.000	
	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu			7	Layanan, Laporan, Dokumen	306.251.000	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	229.286.000	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota
Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	6	Laporan	76.965.000	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota
	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi			7	Layanan, Laporan, Dokumen	261.500.000	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	73.400.000	1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota Semester
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	6	Laporan	188.100.000	
TOTAL							95.589.859.000	

Jakarta, Oktober 2022
 BAWASLU PROVINSI BANTEN
 KEPALA SEKRETARIAT,

 JOHN ABDULLAH BULURAN
 NIP. 19740202 199303 1 002